



RENCANA KERJA (RENJA)



TAHUN 2027

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KAB. BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2027 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusunan Renja DinsosP3A ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renja DinsosP3A Tahun 2027 ini juga sebagai perwujudan penerapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah. Terkait hal tersebut, tentunya secara teknis masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, untuk itu kami mohon koreksi dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan selanjutnya. Dengan tersusunnya Dokumen Renja DinsosP3A Tahun 2027 ini, diharapkan bisa menjadi dokumen acuan perencanaan yang lebih representatif dan terukur dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas DinsosP3A Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 31 Juli 2026

Plt. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banyumas



Budi Suharyanto, S.H.
NIP. 196905251990021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 3

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4. SISTEMATIKA..... 7

BAB II..... 11

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 11

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN BERUPA IKU DAN IKK
TAHUN 2025 (CAPAIAN TAHUN PERTAMA RENSTRA TAHUN 2025-2029) 11

2.2. EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025 14

2.3. RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027
BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029, RKPD TAHUN 2027, DAN
EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2025 DAN KONDISI LINGKUNGAN
DINAMIS..... 14

2.4. TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD..... 15

2.5. INOVASI PERANGKAT DAERAH 16

BAB III 17

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..... 17

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH 17

3.2. ARAH KEBIJAKAN YANG SUDAH DISELARASKAN DENGAN RENSTRA
TAHUN 2025-2029, RKP 2027, RKPD 2027, DAN KEBIJAKAN NASIONAL/DAERAH
LAINNYA 18

BAB IV 22

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2027 YANG
DISUSUN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029, RENSTRA PERANGKAT
DAERAH 2025-2029 DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN,
DAN SUBKEGIATAN. 23

4.2 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT
DAERAH YANG MENDUKUNG TRILAS / PROGRAM UNGGULAN BUPATI 58

4.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT
DAERAH YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN DAN/ATAU
PROGRAM DELEGASI GUBERNUR DAN/ATAU PROGRAM PRIORITAS NASIONAL,
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAN PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
(PHTC)..... 59

BAB V 68

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 68

BAB VI 70

PENUTUP..... 70

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap dinamika perkembangan yang terjadi. Sistem perencanaan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui jenjang perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Pada tingkat daerah, dokumen perencanaan tersebut terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah.

Sejalan dengan penyusunan RKPD, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta pagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) serta mengacu pada RKPD sehingga tercipta kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan penyusunan yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai penyusunan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Tahap kedua adalah penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan. Tahapan ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok

sasaran, serta prakiraan maju yang dirumuskan dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja perangkat daerah.

Tahap ketiga adalah penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang merupakan penyempurnaan dari rancangan awal Renja. Rancangan tersebut kemudian diverifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan keselarasan antara rancangan Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD. Selanjutnya dilaksanakan Forum Perangkat Daerah atau Forum Lintas Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh kepala perangkat daerah dengan berkoordinasi dengan Bapperida serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi serta kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan dalam forum tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh perwakilan pemangku kepentingan yang hadir.

Tahapan berikutnya adalah perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang merupakan penyempurnaan dari rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah mengenai RKPD. Pada tahap ini dilakukan penajaman terhadap program, kegiatan, serta pagu indikatif perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD. Tahap terakhir adalah penetapan Renja Perangkat Daerah, di mana rancangan akhir Renja diverifikasi kembali untuk memastikan kesesuaiannya sebelum ditetapkan melalui peraturan kepala daerah paling lambat satu bulan setelah penetapan RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029 dan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

RKPD yang telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah, yaitu Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Program dan kegiatan yang tercantum dalam KUA, PPAS, dan RAPBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai perangkat daerah menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) DINSOSP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dokumen Renja Perangkat Daerah tersebut selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun perencanaan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja DinsosP3A Kabupaten Banyumas tahun 2027 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan stunting;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023

- tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8)
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 103);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 110);
30. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 35).
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
32. Peraturan Bupati Banyumas No.80 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Banyumas

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2027 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2027 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja DinsosP3A Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman DinsosP3A Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan DinsosP3A Kabupaten Banyumas selama tahun 2027.
3. Sebagai acuan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan berupa IKU dan IKK tahun 2025 (capaian pertama Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029)
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) mencakup IKU dan IKK Tahun 2025.

2.2. Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025

Bab ini, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3. Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2027, dan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, dan kondisi lingkungan dinamis

berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas fungsi Perangkat Daerah dan dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian

Nasional/Internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*), tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Bagian ini memuat uraian mengenai berbagai bentuk inovasi yang telah, sedang, atau direncanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2. Arah kebijakan yang sudah diselaraskan dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2027, RKPD Tahun 2027, dan Kebijakan Nasional/Daerah lainnya.

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

menguraikan Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD tahun 2025-2029, Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 dan Evaluasi capaian kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan. Program, kegiatan, sub kegiatan prioritas perangkat daerah beserta aktivitas, indikator, target, dan anggaran yang mendukung

TRILAS/Program Unggulan Bupati. Program, Kegiatan dan sub kegiatan prioritas perangkat daerah yang mendukung Program Prioritas Kabupaten dan/atau Program Delegasi Gubernur dan/atau Program Prioritas Nasional, Program Strategis Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menyajikan target kinerja indikator bidang urusan yang meliputi IKU dan IKK tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB VI PENUTUP

menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Berisikan Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional Perangkat daerah Tahun 2027.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA BIDANG URUSAN BERUPA IKU DAN IKK TAHUN 2025 (CAPAIAN TAHUN PERTAMA RENSTRA TAHUN 2025-2029)

Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja pada tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan, program, kegiatan, serta kebutuhan pendanaan pada tahun perencanaan berikutnya. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat melalui dokumen pertanggungjawaban kinerja pemerintah yang disusun secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen tersebut menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi, baik dari sisi capaian indikator kinerja maupun realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut, pada bagian ini disajikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2025 serta gambaran perkiraan capaian kinerja tahun 2026 yang mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2027.

Penetapan indikator kinerja merupakan langkah penting dalam proses perencanaan karena berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut mencakup indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Setiap indikator kinerja ditetapkan beserta target yang ingin dicapai sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja organisasi. Indikator kinerja

tersebut telah ditetapkan pada saat penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 melalui proses pembahasan, koordinasi, dan verifikasi baik secara internal perangkat daerah maupun dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2025 dilaksanakan melalui dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian dievaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian target kinerja serta tingkat penyerapan anggaran yang telah dialokasikan. Evaluasi ini juga mencakup analisis terhadap perubahan alokasi anggaran, efektivitas penggunaan sumber daya, serta perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Evaluasi capaian kinerja bidang urusan berupa IKU dan IKK Tahun 2025

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	IKK Renstra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan						
	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	√		%	100%	100%	100,00%
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	√		Angka	65	72,72	111,88%
	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	√		Angka	63	72,35	114,84%
	Indek Pembangunan Gender (IPG)	√		Angka	89,75	90,01	100,29%
1	Sasaran						
	Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	√	√	Angka	5,29	4,65	87,90%
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota	√		%	100%	100%	100,00%
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	√		Angka	0,21 - 0,204	0,193	94,61%
2	Sasaran						
	Persentase Jenis PPKS yang tertangani	√		%	100%	100%	100,00%
3	Sasaran						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	√		Angka	N/A	N/A	N/A
	Nilai SPIP Perangkat Daerah	√		Angka	N/A	N/A	N/A
	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	√		Angka	N/A	N/A	N/A
	IKK						
	Tingkat Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		√	%	100%	100%	100,00%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		√	%	100%	100%	100,00%
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani Instansi kabupaten/kota		√	%	100%	100%	100,00%

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	IKU	IKK	Satuan	IKK Renstra 2025-2029		
					Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
	Persentase ARG pada belanja APBD		√	%	58,7%	N/A	N/A

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja baik itu Tujuan, Sasaran Urusan Sosial tercapai 100%. Sedangkan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada beberapa yang capaiannya diatas dan dibawah 100% dikarenakan berbagai sebab sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) capaian diatas 100% dikarenakan berdasar data dari KemenPPPA untuk tahun 2025 belum tersedia sehingga menggunakan data capaian tahun 2024.
2. Indeks Pembangunan Gender capaian diatas 100% karena semakin mendekati angka 100 berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan Rasio antara IPM perempuan dan IPM laki-laki sebagai analisis perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan laki-laki.
3. Indeks Ketimpangan Gender capaian dibawah 100% tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten mengalami penurunan yang melampaui target yang telah direncanakan yang dimana semakin besar nilai indeksnya berarti ketimpangan gender di suatu wilayah semakin besar.

Sedangkan untuk Sasaran dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Nilai SPIP Perangkat Daerah dan Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah belum memiliki realisasi pada Tahun 2025 karena Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk sebagai hasil penataan kelembagaan pemerintah daerah. Dan untuk indikator IKK Renstra 2025-2029 urusan sosial dan perlindungan anak tercapai 100%, sementara indikator ARG tidak adanya capaian bukan karena target tidak tercapai, melainkan karena indikator tersebut sudah tidak terpakai.

2.2.EVALUASI CAPAIAN SPM TAHUN 2023-2025

Berikut Data Capaian berdasarkan Permensos No 9 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Umum Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara Minimal.

Tabel 2.6
Evaluasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2023-2025

No	Indikator SPM	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Disabilitas Terlantar	Orang	184	191	193	184	191	193	100 %	100 %	100 %
2	Anak Terlantar	Orang	37	13	46	37	13	46	100 %	100 %	100 %
3	Lansia Terlantar	Orang	31	39	21	31	39	21	100 %	100 %	100 %
4	Gelandan Dan Pengemis Terlantar	Orang	78	94	45	78	94	45	100 %	100 %	100 %
5	Bencana	Orang	119	288	1.014	119	288	1.014	100 %	100 %	100 %

Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial pada Tahun 2025 berhasil mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh jenis pelayanan dasar pada Urusan Sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dilaksanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.

2.3. RUMUSAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027 BERDASARKAN RENSTRA TAHUN 2025-2029, RKPD TAHUN 2027, DAN EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2025 DAN KONDISI LINGKUNGAN DINAMIS

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan serta perkembangan kondisi sosial masyarakat, terdapat beberapa permasalahan strategis yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan urusan sosial serta urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Banyumas. Isu-isu tersebut berkaitan dengan tingkat capaian pelayanan perangkat daerah, hambatan dalam pelaksanaan program, serta tantangan yang perlu diantisipasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas.

Perumusan isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dilakukan dari permasalahan yang ada dan/atau sebagai hasil evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, sebagai berikut:

- a. Urusan Sosial diperoleh isu yaitu :
 - 1) Cakupan JKN belum optimal;
 - 2) Rendahnya jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - 3) Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- b. urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:
 - 1) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak

2.4. TELAAH POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pada Tahun Anggaran 2027, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7

Telaah pokok-pokok pikiran DPRD

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)
	-	-	-	-

2.5. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Inovasi diperlukan dalam rangka memberikan kemudahan atas permasalahan maupun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Berikut ini daftar inovasi yang dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

- Urusan Sosial Terkait dengan Urusan Sosial telah direncanakan dan konsep membuat inovasi “Gendis Berkarya”. Inovasi ini merupakan wujud kepedulian terhadap kelompok yang selama ini disebut inklusif, yaitu kelompok-kelompok rentan yang mengalami kekurangan seperti kelompok Disabilitas, namun masih mampu dan produktif. Sehingga dengan inovasi ini, kelompok tersebut diberi wadah dan media untuk mengembangkan potensi dan memperluas pemasaran atau hasil produksinya dengan fasilitasi dari tenaga terlatih yang ada di Dinas Sosial dan/atau tenaga ahli lainnya di Kabupaten Banyumas.
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak melalui kegiatan Forum Anaknya membuat inovasi “Tilik Desa”. Sebagai wujud kepedulian Forum Anak Banyumas dalam mendukung dan sebagai bentuk partisipasi anak dalam pembangunan, dengan memantau, mendengar dan mengumpulkan aspirasi anak-anak di seluruh wilayah desa yang ada di kabupaten Banyumas.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

DinsosP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (Dinas) yang melaksanakan urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas, membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk kebijakan teknis di bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2025-2029. ”
Terwujudnya Banyumas yang Adil, Produktif dan Sejahtera”

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2027 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 antara lain :

Tujuan	Sasaran
Terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS serta Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan anak	Meningkatnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
	Cakupan jenis PPKS yang tertangani
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah

3.2. ARAH KEBIJAKAN YANG SUDAH DISELARASKAN DENGAN RENSTRA TAHUN 2025-2029, RKP 2027, RKPD 2027, DAN KEBIJAKAN NASIONAL/DAERAH LAINNYA

Prioritas pembangunan daerah tahun 2027 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2027 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

RKP Tahun 2027 merupakan penjabaran dari dokumen RPJMN 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 didasarkan atas Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 8 (delapan) Misi pembangunan/Asta Cita, yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional. Prioritas Nasional tersebut antara lain:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumberdaya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,

judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 disusun pentahapan fokus kebijakan pembangunan daerah. Arah kebijakan pada tahun 2027 fokus diarahkan pada kebijakan “Meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional”. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kebijakan tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;
5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

Pembangunan Daerah Jawa Tengah tahun 2027 juga diarahkan untuk “Penguatan Landasan Pembangunan Daerah” dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan prioritas daerah yaitu:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis.
2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan.
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Rencana Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 disusun untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD. Adapun visi yang ditetapkan adalah: “Mewujudkan Banyumas yang Produktif, Adil, dan Sejahtera.” Perwujudan visi tersebut dijabarkan melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing SDM;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri, dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah berintegritas, adaptif, dan kolaboratif serta mendukung peningkatan daya saing daerah;
6. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029, RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diarahkan untuk “Pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan daya saing sumber daya manusia serta efektivitas kelembagaan daerah sebagai landasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan”. Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 diprioritaskan untuk:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar dan kebutuhan masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan
- b. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
- c. Pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan
- d. Peningkatan efektivitas kelembagaan daerah dalam kolaborasi penanganan isu strategis
- e. Peningkatan daya saing infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah

Penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027 selain mengintegrasikan program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2025-2029, juga mengintegrasikan dukungan program terhadap program prioritas Gubernur Jawa Tengah yang didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Sosial, PPPA Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi

NSPK sesuai dengan tugas dan fungsinya dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Renstra DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket
1	2	3	4	5
1.	Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan	Percepatan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan terintegrasi yang melibatkan program pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong kemiskinan dengan pemutakhiran data penerima bantuan yang lebih akurat. Peningkatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat	Peningkatan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.	Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2027 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan e-planning tahun 2027, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung TRILAS/ Program Unggulan Bupati, dan juga program, kegiatan sub kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten dan/atau Program Delegasi Gubernur dan/atau Program Nasional, Program Strategis Nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagai berikut:

4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN TAHUN 2027 YANG DISUSUN BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2025-2029, RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029 DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN.

Tabel 4.1 Rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.711.140.541,00				
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.107.140.541,00				
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.107.140.541,00				
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.555.156.641,00				
			2.021.821.840,00				
			6.958.934.801,00				
			574.400.000,00				
			9.555.156.641,00				
			9.555.156.641,00				
			7.899.443.741,00				
			1.655.712.900,00				
			9.555.156.641,00				
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.456.486,00				
		-	28.456.486,00				
			13.956.486,00				
			14.500.000,00				
	1.06.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.956.486,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.956.486,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00				
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.958.934.801,00				
		-	6.958.934.801,00				
			100.000.000,00				
			6.858.934.801,00				
	1.06.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.858.934.801,00				
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6.858.934.801,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	297.652.454,00				
		-	297.652.454,00				
			3.000.000,00				
			129.652.454,00				
			60.000.000,00				
			20.000.000,00				
			25.000.000,00				
			20.000.000,00				
			40.000.000,00				
	1.06.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00				
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00				
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00				
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	1.06.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.652.454,00				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.652.454,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00				
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60.000.000,00				
		-	60.000.000,00				
			10.000.000,00				
			50.000.000,00				
			0				
	1.06.01.2.07.005	Pengadaan Mebel	10.000.000,00				
		Tersedianya Mebel	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.07.0 011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.655.712.900,00				
		-	1.655.712.900,00				
			300.000.000,00				
			1.355.712.900,00				
			0				
	1.06.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00				
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	300.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggandisabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.712.900,00				
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.355.712.900,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.400.000,00				
		-	574.400.000,00				
			230.400.000,00				
			325.000.000,00				
			4.000.000,00				
			15.000.000,00				
	1.06.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.000.000,00				
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00				
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.01.2.09.0 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.400.000,00				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	85.000.000,00				
			85.000.000,00				
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	0				
		-	0				
			0				
			0				
	1.06.02.2.01.0 002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	0				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.02.2.01.004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	0				
		Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000,00				
		-	85.000.000,00				
			10.000.000,00				
			50.000.000,00				
			10.000.000,00				
			15.000.000,00				
	1.06.02.2.03.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00				
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.02.2.03.004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan	50.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.02.2.03.0 012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	15.000.000,00				
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.02.2.03.0 014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00				
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	697.000.000,00				
			697.000.000,00				
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	655.000.000,00				
		-	655.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
			25.000.000,00				
			10.000.000,00				
			200.000.000,00				
			0,00				
			5.000.000,00				
			10.000.000,00				
			20.000.000,00				
			250.000.000,00				
			50.000.000,00				
			10.000.000,00				
			50.000.000,00				
			25.000.000,00				
	1.06.04.2.01.0 001	Penyediaan Permakanan	250.000.000,00				
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 002	Penyediaan Sandang	50.000.000,00				
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 003	Penyediaan Alat Bantu	200.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	50.000.000,00				
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	25.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	10.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0				
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 010	Pemberian Layanan Kedaruratan	5.000.000,00				
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	1.06.04.2.01.0 011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	10.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 012	Pemberian Layanan Rujukan	25.000.000,00				
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.01.0 014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	42.000.000,00				
		-	42.000.000,00				
			0				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
			3.000.000,00				
			3.000.000,00				
			3.000.000,00				
			7.000.000,00				
			0				
			0				
			3.000.000,00				
			3.000.000,00				
			0				
			10.000.000,00				
			0				
			5.000.000,00				
			5.000.000,00				
	1.06.04.2.02.0 001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	0				
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0 002	Pemberian Layanan Kedaruratan	0				
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0 003	Penyediaan Permakanan	10.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.004	Penyediaan Sandang	0				
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.005	Penyediaan Alat Bantu	7.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	0				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.000.000,00				
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	5.000.000,00				
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	3.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0 011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	3.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0 012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	3.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.04.2.02.0 013	Pemberian Layanan Rujukan	3.000.000,00				
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	1.06.04.2.02.0 014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0				
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	0	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.454.983.900,00				
			3.454.983.900,00				
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	25.000.000,00				
		-	25.000.000,00				
			15.000.000,00				
			5.000.000,00				
			5.000.000,00				
	1.06.05.2.01.0 001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	15.000.000,00				
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.05.2.01.0 002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	5.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.05.2.01.0 003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	5.000.000,00				
		Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3.429.983.900,00				
		-	3.429.983.900,00				
			5.000.000,00				
			2.774.983.900,00				
			650.000.000,00				
	1.06.05.2.02.0 004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	5.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.05.2.02.0 006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.774.983.900,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2.774.983.900,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00				
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	650.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	145.000.000,00				
			145.000.000,00				
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	115.000.000,00				
		-	115.000.000,00				
			5.000.000,00				
			25.000.000,00				
			5.000.000,00				
			70.000.000,00				
			10.000.000,00				
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	70.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	70.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	1.06.06.2.01.0 002	Penyediaan Sandang	25.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.06.2.01.0 004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	5.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.06.2.01.0 005	Pelayanan Dukungan Psikososial	5.000.000,00				
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.06.2.01.0 007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	10.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	30.000.000,00				
		-	30.000.000,00				
			10.000.000,00				
			20.000.000,00				
	1.06.06.2.02.0 001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	10.000.000,00				
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	1.06.06.2.02.0 002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	20.000.000,00				
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	150.000.000,00				
			150.000.000,00				
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	150.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		-	150.000.000,00				
			150.000.000,00				
	1.06.07.2.01.0 002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	150.000.000,00				
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	604.000.000,00				
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	604.000.000,00				
7.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	300.000.000,00				
			300.000.000,00				
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00				
		-	50.000.000,00				
			30.000.000,00				
			20.000.000,00				
	2.08.02.2.01.0 007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00				
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	20.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	2.08.02.2.01.0 017	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	30.000.000,00				
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	235.000.000,00				
		-	235.000.000,00				
			225.000.000,00				
			10.000.000,00				
	2.08.02.2.02.0 011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00				
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.02.2.02.0 013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	225.000.000,00				
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	225.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000,00				
		-	15.000.000,00				
			5.000.000,00				
			10.000.000,00				
	2.08.02.2.03.0 013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00				
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.02.2.03.0 014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	5.000.000,00				
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
8.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	155.000.000,00				
		-	155.000.000,00				
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00				
		-	50.000.000,00				
			50.000.000,00				
			0,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	50.000.000,00				
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.03.2.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	0,00				
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00				
		-	105.000.000,00				
			5.000.000,00				
			100.000.000,00				
	2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	5.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	100.000.000,00				
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
9.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	10.000.000,00				
			10.000.000,00				
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00				
		-	10.000.000,00				
			10.000.000,00				
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	10.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
10.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	5.000.000,00				
			5.000.000,00				
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000,00				
		-	5.000.000,00				
			5.000.000,00				
	2.08.05.2.01.007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	5.000.000,00				
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	5.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
11.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	34.000.000,00				
			34.000.000,00				
	2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00				
		-	25.000.000,00				
			10.000.000,00				
			15.000.000,00				
	2.08.06.2.01.007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	15.000.000,00				
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9.000.000,00				
		-	9.000.000,00				
			9.000.000,00				
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	9.000.000,00				
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
12.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100.000.000,00				
			100.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00				
		-	50.000.000,00				
			40.000.000,00				
			10.000.000,00				
	2.08.07.2.01.0 012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	10.000.000,00				
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.07.2.01.0 014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	40.000.000,00				
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	40.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00				
		-	50.000.000,00				
			50.000.000,00				
	2.08.07.2.03.0 016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	50.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
		UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	268.000.000,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	268.000.000,00				
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	268.000.000,00				
13.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0,00				
		-	0,00				
			0,00				
			0,00				
			0,00				
	2.08.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.01.2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00				
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.01.2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0,00				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0,00				
		-	0,00				
			0,00				
	2.08.01.2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	-	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
14.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	118.000.000,00				
			118.000.000,00				
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	118.000.000,00				
		-	118.000.000,00				
			0,00				
			0,00				
			118.000.000,00				
	2.08.03.2.02.0 010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	0,00				
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.03.2.02.0 014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	118.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	118.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	2.08.03.2.02.016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	0,00				
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
15.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	150.000.000,00				
			150.000.000,00				
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00				
		-	150.000.000,00				
			150.000.000,00				
			0,00				
	2.08.07.2.02.017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	150.000.000,00				
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	150.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	
						NASIONAL	DAERAH
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	0,00				
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Banyumas Kecamatan Purwokerto Barat Kelurahan Kober 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	J U M L A H		14.979.140.541,00				

4.2 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG TRILAS / PROGRAM UNGGULAN BUPATI

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. DinsosP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas yang melaksanakan urusan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan, meliputi tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DinsosP3A terhadap Program Unggulan Bupati/TRILAS

No	Program TRILAS	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan	Aktivitas	Satuan	Target	Pagu Anggaran Aktivitas
1.	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Pemutakhiran Data (Verval)	Usulan	15000	650.000.000

4.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN DAN/ATAU PROGRAM DELEGASI GUBERNUR DAN/ATAU PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAN PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)

DinsosP3A sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Dinas yang melaksanakan urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Banyumas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan kabupaten dan/atau program delegasi gubernur dan/atau prioritas nasional, program strategis nasional, program hasil terbaik cepat (PHCT) tersaji pada rangkaian data dan meliputi tabel di bawah ini:

Tabel 4.3.1 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DinsosP3A terhadap Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2027

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	4. Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan 5. Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan 6. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	hidup keluarga yang dilaksanakan	keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
		Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 2. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten 2027	Program Prioritas OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
		Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 3. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan kampung siaga bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota

Tabel 4.3.2 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DinsosP3A dengan Program Delegasi Gubernur

No	Prioritas Delegasi Gubernur	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan

No	Prioritas Delegasi Gubernur	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
							Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan 3. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan
		Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 3. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2.	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan 3. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi
3.	Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

No	Prioritas Delegasi Gubernur	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			2. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 3. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia		kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		Kewenangan Kabupaten/Kota
4.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 2. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

Tabel 4.3.3 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DinsosP3A dengan Program Prioritas Nasional

No	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1. Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota

No	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			3. Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi
2.	Pemberantasan kemiskinan	Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 2. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Program Prioritas Nasional	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial				
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	1.Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2.Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 3.Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 3. Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

Tabel 4.3.4 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DinsosP3A dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan
2.	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan

Tabel 4.3.5 Dukungan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DinsosP3A dengan Program Strategis Nasional

No	Program Strategis Nasional (PSN)	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
1.	Penanggulangan Kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan
2.		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan	1. Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

No	Program Strategis Nasional (PSN)	Program OPD	Indikator Program	Kegiatan OPD	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan OPD	Indikator Sub Kegiatan
			2. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas 3. Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia	Pengemis di Luar Panti Sosial	3. Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		
		Program Pemberdayaan Sosial	1. Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial 2. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada DinsosP3A Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berikut ini Indikator Bidang Urusan yang meliputi target kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) di Tahun 2027

1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama DinsosP3A Tahun 2027

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2027	Nomenklatur Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	Tujuan
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	65,8	Tujuan
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Angka	64	Tujuan
Indek Pembangunan Gender (IPG)	Angka	90,35	Tujuan
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,207 - 0,189	Sasaran
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Kabupaten/Kota	%	100	Sasaran
Rasio Korban Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Angka	5,27	Sasaran
Persentase Jenis PPKS yang tertangani	%	100	Sasaran
Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	3,65	Sasaran
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,1	Sasaran
Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,44	Sasaran

2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 yang didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci DinsosP3A Tahun 2027

Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /SubKegiatan	Satuan	Realisasi 2025	Target 2027	Nomenklatur Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/SubKegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Program Rehabilitasi Sosial
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Program Rehabilitasi Sosial
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Program Rehabilitasi Sosial
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	Program Rehabilitasi Sosial
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	Program Rehabilitasi Sosial
Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	Program Penanganan Bencana
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	Program Perlindungan Khusus Anak
Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	Program Perlindungan Perempuan

Berdasarkan KEPMENDAGRI NOMOR 100.2.1.7-109 TAHUN 2026

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas Tahun 2027. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada DinsosP3A Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pelaksanaan Renja DinsosP3A Kabupaten Banyumas Tahun 2027, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja DinsosP3A Tahun 2027 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2027 dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Provinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. DinsosP3A dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja DinsosP3A Tahun 2027 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2027.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Dokumen RENJA Tahun 2027 ini menyajikan Matriks rincian Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Register Risiko dan Rencana Penanganan Risiko Operasional Perangkat Daerah Tahun 2027 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2027 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju “Banyumas yang Adil, Produktif dan Sejahtera”.

Plt. KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANYUMAS



BUDI SUHARYANTO, S.H
NIP. 196905251990021001

LAMPIRAN

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas
Tahun 2027

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				14.711.140.541,00		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai kematangan organisasi Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi IKM Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	46 Nilai 81% 84,1 angka 100% 95,60%	9.555.156.641,00		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100% 100%	28.456.486,00		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	13.956.486,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	14.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		<i>Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD) Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100% 100%	6.958.934.801,00		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	54 Orang/bulan	6.858.934.801,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	4 Dokumen	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	40 angka 100%	297.652.454,00		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	2 Paket	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	60.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	7 Paket	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	160 Laporan	129.652.454,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	5 Dokumen	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		<i>Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)</i>	100%	60.000.000,00		
	Pengadaan Mebel	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	4 Unit	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	3 Unit	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	0 Unit	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%	1.655.712.900,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.355.712.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah</i>	72% 100%	574.400.000,00		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	42 Unit	325.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Mebel	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	2 Unit	4.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	7 Unit	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	230.400.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		<i>Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan Sosial Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial</i>	57% 100%	85.000.000,00		
	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)		<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan</i>	0 Kegiatan	0		
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Keluarga	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Keluarga	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan</i>	7 Lembaga	85.000.000,00		
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Keluarga	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Lembaga	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>	6 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		<i>Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Lanjut Usia</i>	56,72 Indeks 100% 54,33 Indeks	697.000.000,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		<i>Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i> <i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i> <i>Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	100 Orang 240 Orang 60 Orang	655.000.000,00		
	Penyediaan Permakanan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	400 Orang	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Sandang	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	160 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	45 Orang	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	40 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	12 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	160 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		<i>Presentase PPKS lainnya yang mendapat fasilitas rehabilitasi sosial</i>	100%	42.000.000,00		
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Permakanan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	25 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Sandang	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Alat Bantu	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	7.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Orang	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	3.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		<i>Persentase PPKS yang menerima jaminan sosial</i>	71,02%	3.454.983.900,00		
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		<i>Jumlah penerima layanan perlindungan sosial bagi anak terlantar</i>	25 Orang	25.000.000,00		
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	5 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	10 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah fakir miskin yang terdata</i>	65000 Orang	3.429.983.900,00		
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	120 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1780 Orang	2.774.983.900,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan</i>	15000 Usulan	650.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		<i>Persentase korban bencana alam dan sosial yan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bencana daerah kabupaten/kota</i>	100%	145.000.000,00		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		<i>Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota</i>	350 Orang	115.000.000,00		
	Penyediaan Makanan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	300 Orang	70.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Sandang	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	100 Orang	25.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	30 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		<i>Jumlah pembinaan kampung siaga bencana</i>	4 Kampung	30.000.000,00		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Kampung	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	102 Orang	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		<i>Persentase makam pahlawan yang dikelola dengan baik</i>	100%	150.000.000,00		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		<i>Jumlah makam pahlawan yang dipelihara</i>	865 Makam	150.000.000,00		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i>	865 Makam	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		<i>Persentase ARG pada belanja langsung APBD Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Persentase Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan</i>	59,1% 50,70% 79,03%	300.000.000,00		
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG</i>	100%	50.000.000,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG</i>	2 Laporan	20.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota</i>	2 Kebijakan	30.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan</i>	40 Organisasi	235.000.000,00		
	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan</i>	160 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi</i>	40 Lembaga	225.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan</i>	28%	15.000.000,00		
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	17 Lembaga	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100%	155.000.000,00		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah penanganan kasus kekerasan perempuan yang ditindaklanjuti</i>	47 Kasus	50.000.000,00		
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat</i>	27 Kegiatan	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota</i>	0 Dokumen	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi</i>	1 Lembaga	105.000.000,00		
	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi</i>	1 Lembaga	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		<i>Persentase keluarga pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	0,037%	10.000.000,00		
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah kegiatan peningkatan kualitas hidup keluarga yang dilaksanakan</i>	1 Kegiatan	10.000.000,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		<i>Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data gender dan anak sebagai dasar perencanaan pembangunan</i>	55,55%	5.000.000,00		
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan data Gender dan Anak sebagai dasar perencanaan</i>	15 Perangkat Daerah	5.000.000,00		
	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia</i>	1 Dokumen	5.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		<i>Persentase lembaga penyedia layanan anak yang telah mendapatkan advokasi komponen pemenuhan hak anak</i>	87%	34.000.000,00		
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak</i>	2 Kegiatan	25.000.000,00		
	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota</i>	28 Lembaga	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan</i>	27 Orang	15.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah lembaga pemerintah yang telah menerapkan kriteria kabupaten layak anak</i>	27 Perangkat Daerah	9.000.000,00		
	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>	25 Lembaga	9.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
12	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		<i>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100%	100.000.000,00		
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah media massa yang bekerja sama dengan pemkab dalam pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	3 Lembaga	50.000.000,00		
	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen	10.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.</i>	1 Kegiatan	40.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal</i>	1 Lembaga	50.000.000,00		
	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>	120 Orang	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		<i>Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0%	0		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	0%	0		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	0 Paket	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	0%	0		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	0 Laporan	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		<i>Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100%	118.000.000,00		
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		<i>Jumlah kasus kekerasan perempuan yang mendapatkan rujukan</i>	19 Kasus	118.000.000,00		
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota</i>	50 Orang	118.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		<i>Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</i>	100%	150.000.000,00		
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah jenis penyediaan layanan bagi anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus</i>	6 Layanan	150.000.000,00		

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota</i>	63 Orang	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK	
	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Kab. Banyumas, Purwokerto Barat, Kober	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota</i>	0 Orang	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
JUMLAH					14.979.140.541,00		

REGISTER RISIKO DAN RENCANA PENANGANAN RISIKO OPERASIONAL DINSOSP3A TH 2027

No	Program/Kegiatan	No	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah fakir miskin yang terdata	Data Penerima Manfaat tidak akurat/tidak mutakhir	Data tidak diperbarui secara berkala, validasi dan verifikasi lapangan terbatas serta perubahan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat tidak terdata	Bantuan tidak tepat sasaran	Pemkab, OPD, Masyarakat	Melakukan verval perbaikan pendataan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengintensifkan verifikasi dan validasi data lapangan	Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosial	TW 1,2,3,4
2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	Keterbatasan sumber daya dan logistik terhadap penanganan korban bencana alam dan sosial	1. Terbatasnya SDM yang terlatih 2. Infrastruktur yang rusak akibat bencana	Terlambatnya proses penyaluran bantuan kepada korban bencana serta penurunan kualitas dan kuantitas bantuan	Masyarakat	Pendataan manual,penyaluran bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial,kordinasi antar lembaga	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memperkuat koordinasi dengan instansi terkait	Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosial	TW 1,2,3,4
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PPKS tidak memiliki dokumen kependudukan	Kehilangan dokumen atau belum pernah melakukan perekaman data kependudukan	Kesulitan memperoleh layanan sosial dan program bantuan	PPKS	Pendampingan pengurusan dokumen kependudukan dan koordinasi dengan Disdukcapil	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koordinasi dengan Dindukcapil untuk fasilitasi administrasi kependudukan	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	TW 1,2,3,4
		2	Jumlah anak terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti										
		3	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi										

No	Program/Kegiatan	No	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
			kebutuhan dasarnya di luar panti										
4	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Jumlah kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	Monitoring dan evaluasi implementasi PHA belum optimal	Keterbatasan SDM, anggaran, dan jadwal monitoring	Permasalahan implementasi PHA tidak segera diketahui dan ditindaklanjuti	OPD, Perangkat Daerah, Lembaga Mitra	Sudah dilakukan kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kegiatan advokasi bagi lembaga layanan anak	Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	TW 1,2,3,4
5	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah PSKS yang mendapat pembinaan	Masih banyak PSKS yang belum mendapatkan pelatihan/bimtek	Pelatihan/bimtek belum mencakup seluruh daerah	Belum maksimalnya keterampilan anggota PSKS (Karangtaruna, Tagana, TKSK)	OPD, PSKS	Sudah dilakukan beberapa pelatihan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan bimek/ sosialisasi dan koordinasi	Kabid Pemberdayaan Sosial	TW 1,2,3,4
6	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1	Jumlah makam pahlawan yang dipelihara	Kondisi fisik Taman Makam Pahlawan (TMP) tidak terpelihara dengan baik	Keterbatasan anggaran pemeliharaan, kurangnya tenaga pemelihara, dan intensitas pemeliharaan belum optimal	Nilai estetika, kebersihan, dan kehormatan TMP menurun	Pemerintah Daerah, keluarga pahlawan, masyarakat	Pemeliharaan rutin meliputi kebersihan area makam, taman, fasilitas umum, dan sarana pendukung TMP	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan perawatan taman secara berkala (pemangkasan, penyiraman, penggantian tanaman)	Kabid Pemberdayaan Sosial	TW 1,2,3,4
7	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	Dokumen perencanaan dan penganggaran belum responsif gender	Perangkat daerah belum memahami penyusunan GAP, GBS, dan ARG	Program dan anggaran belum memperhatikan kesenjangan gender	Perangkat Daerah, masyarakat	Pendampingan penyusunan dokumen PPRG dan reviu dokumen perencanaan telah dilakukan	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melaksanakan pendampingan penyusunan GAP, GBS, dan ARG	Kabid Pemberdayaan Perempuan	TW 1,2,3,4
8	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	1	Jumlah Organisasi Perempuan yang berpartisipasi aktif dalam Pembangunan	Organisasi perempuan belum seluruhnya berperan secara aktif	Belum maksimal dalam penguatan organisasi perempuan	Organisasi perempuan tidak optimal beraktifitas dalam pembangunan	Pemkab, OPD, Masyarakat	Undangan kegiatan disampaikan kepada organisasi perempuan, koordinasi dengan kecamatan dan organisasi	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko	Meningkatkan sosialisasi, koordinasi dengan organisasi perempuan	Kabid Pemberdayaan Perempuan	TW 1,2,3,4

No	Program/Kegiatan	No	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko	Sebab	Dampak	Pihak yang terkena	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
	Kewenangan Kabupaten/Kota							masyarakat telah dilakukan		yang teridentifikasi			
9	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Jumlah Jenis Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus;	Pendampingan psikologis, hukum, dan sosial belum optimal	Keterbatasan tenaga profesional dan jejaring layanan	Pemulihan korban tidak optimal	Korban	Telah tersedia jejaring layanan yang melibatkan psikolog, pekerja sosial, Dinas Kesehatan, kepolisian, dan lembaga bantuan hukum	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Memperkuat kerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, LBH, tenaga kesehatan, dan aparatus penegak hukum	Kepala UPTD	TW 1,2,3,4
10	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manipulasi pelaporan realisasi penggunaan dana	Tekanan ekonomi, kurangnya integritas pegawai	Dampak hukum, dampak kinerja	Pegawai, OPD	Pengawasan oleh atasan langsung, pemeriksaan oleh verifikator	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui sinternalisasi kode etik, optimalisasi pemeriksaan oleh verifikator keuangan	Sekretaris	TW 1,2,3,4
		2	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)										
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Manipulasi data kehadiran pegawai ASN dan Non ASN	Pembenaran, peluang berbuat curang	Dampak kinerja, dampak budaya	Pegawai	PP 94 th 2021 tentang Disiplin PNS, Perubp Kode Etik ASN	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penguatan integritas pada saat apel antara lain melalui internalisasi Kode Etik, pengawasan oleh atasan langsung	Sekretaris	TW 1,2,3,4